

Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Pengendalian Tembakau: Wawasan dari Program Kawasan Tanpa Rokok Bone-Bone

Improving the Effectiveness of Tobacco Control Policies: Insights from the Bone-Bone Smoke Free Area Program

Didik Iskandar¹

Muhammad Irvan Nur' Iva²

¹Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Negeri Makassar,
Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Publik,
Universitas Negeri Makassar,
Makassar, Indonesia

email: didik.iskandar@unm.ac.id

Kata Kunci

Kebijakan
Implementasi
Kawasan Bebas Asap Rokok

Keywords:

Policy
Implementation
Smoke Free Area

Received: Juli 2025

Accepted: Juli 2025

Published: Juli 2025

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, dengan fokus pada analisis kebijakan, tantangan implementasi, dan saran untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait kebijakan dan regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, implementasi program menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan kurangnya inovasi kebijakan. Sanksi yang diterapkan tidak efektif dalam mengubah perilaku merokok masyarakat, terutama di kalangan pemuda. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup peningkatan penegakan hukum, inovasi kebijakan yang responsif, dan pendekatan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini secara berkelanjutan.

Abstract

The aim of this research is to evaluate the implementation of the Smoke Free Zone program in Bone-Bone Village, with a focus on policy analysis, implementation challenges, and suggestions for future policy improvements. The research method used includes a qualitative descriptive study with data collection through in-depth interviews and analysis of documents related to existing policies and regulations. The research results show that despite clear regulations, program implementation faces challenges in consistent law enforcement and a lack of policy innovation. The sanctions applied are not effective in changing people's smoking behavior, especially among youth. Recommendations for further research include increasing law enforcement, responsive policy innovation, and a more intensive outreach approach to increase community participation in supporting this program on an ongoing basis.



© Year Author(s). Published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur <https://jurnal.uit.ac.id/IPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: <https://doi.org/10.36090>

PENDAHULUAN

Pada saat ini, kondisi kemajuan suatu daerah juga dapat diukur dari kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu negara adalah kondisi kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan yang baik memberikan dampak positif terhadap kekuatan suatu bangsa untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, kondisi kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi kualitas hidup di suatu daerah. Masalah kesehatan sering kali disebabkan oleh kebiasaan merokok, yang telah menjadi hal lumrah di kalangan masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk masyarakat atas dan bawah. (Rosdianti, 2021)

Saat ini, jumlah perokok di dunia mencapai 1,3 miliar jiwa, dengan 84% berasal dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia, setelah China dan India (Najihah et al., 2023). Data terbaru dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019 menunjukkan bahwa 40,6% anak-anak Indonesia mulai merokok pada usia rentan 13-15 tahun, baik perempuan maupun laki-laki (Oxa et al., 2022). Dari jumlah tersebut, sebanyak 19,2% adalah pelajar yang aktif merokok, dan dari mereka, 60,6% tidak dicegah saat membeli rokok meskipun belum mencapai usia yang diizinkan. Lebih dari dua pertiga dari mereka dapat membeli rokok secara eceran. Data GYTS juga mencatat bahwa hampir 7 dari 10 pelajar telah melihat iklan rokok di televisi atau tempat penjualan dalam 30 hari terakhir, dan sepertiga dari mereka melihat iklan di internet atau media sosial. (Dewanti et al., 2021)

Merokok tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan individu, tetapi juga secara tidak langsung melalui paparan asap rokok. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Salah satu contoh daerah yang telah menerapkan KTR adalah Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang (Hasibuan & Harahap, 2019; Nurdin, 2016). Program ini diterapkan sejak tahun 2008 dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi prevalensi perokok, yang sebelumnya mencapai 70% dari populasi desa. Namun, implementasi program KTR di Desa Bone-Bone belum konsisten karena kurangnya dukungan dan penegakan sanksi yang tegas, yang mengakibatkan masih adanya pelanggaran terhadap kebijakan ini. (Jatmika et al., 2018)

Penerapan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, menandai sebuah upaya penting dalam kebijakan kesehatan masyarakat (Muslimin, 2016; Pugesehan & Latuheru, 2019). Pendekatan teoritis yang relevan termasuk teori implementasi kebijakan untuk memahami bagaimana kebijakan ini diadopsi dan dijalankan oleh pemerintah daerah (Sahara, 2020). Teori ini juga membantu dalam mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi implementasi program, seperti komitmen pemimpin desa dan efektivitas sanksi yang diberlakukan. Di samping itu, teori sosial juga relevan dalam konteks ini, karena membantu dalam memahami perubahan perilaku terhadap merokok dan bagaimana program ini dapat mempengaruhi norma sosial di masyarakat setempat. Integrasi pendekatan teoritis ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, dan dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat di tingkat lokal. (Nurhidayati et al., 2017)

METODE

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 1), penelitian kualitatif umumnya didefinisikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek

dalam kondisi alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau kombinasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna. Data penelitian digolongkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sementara itu, data sekunder yang mendukung data primer terdiri dari catatan atau dokumentasi seperti absensi, daftar gaji, laporan keuangan, dan sebagainya yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Latar belakang Peraturan

Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, yang sudah ada sejak tahun 2008, dibuat dengan alasan tertentu yang berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi desa tersebut. Program ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat desa. Kepala desa, yang kembali menjabat tahun ini, menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat di kawasan desa tersebut.

Kebijakan yang diterapkan selalu mengutamakan pemahaman masyarakat terhadap program tersebut. Oleh karena itu, informasi mengenai program harus disampaikan dengan jelas kepada pelaku kebijakan dan masyarakat agar mereka dapat mengetahui dan memahami apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan efektif. Keberadaan program ini secara umum dipahami oleh masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kebiasaan merokok yang tidak sehat, terutama di kalangan pemuda dan anak-anak.

Pada awal penerapannya, program ini mendapat tantangan dari masyarakat yang merasa hak mereka dibatasi. Namun, dengan pendekatan dan penjelasan yang baik mengenai latar belakang program, masyarakat mulai memberikan respons positif. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi masalah kebiasaan merokok yang meluas di kalangan masyarakat desa, termasuk anak-anak yang masih berusia 6-12 tahun.

Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok melarang masyarakat desa dan pendatang untuk merokok, menjual, atau mengiklankan produk rokok di wilayah desa. Meski ada sanksi yang ditetapkan, seperti kerja sosial tanpa imbalan bagi pelanggar dan teguran langsung bagi pendatang, masih ada masyarakat yang melanggar peraturan ini.

Program ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak, dengan mengurangi kebiasaan merokok. Dukungan fisik dan infrastruktur untuk program ini, seperti papan informasi, masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam semua tahapannya, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Tabel 1: Dimensi Penyebab Penerapan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone

Dimensi	Uraian Penjelasan
Kesehatan	Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat desa. Kepala desa ingin mengurangi kebiasaan merokok terutama di kalangan anak-anak.
Sosial	Masyarakat Desa Bone-Bone memiliki kebiasaan merokok yang tinggi, termasuk di kalangan anak-anak. Program ini dirancang untuk mengurangi kebiasaan tersebut demi kesejahteraan sosial.
Budaya	Merokok telah menjadi bagian dari budaya masyarakat desa. Program ini berupaya mengubah budaya tersebut agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan lingkungan yang bersih.
Ekonomi	Merokok berdampak pada pengeluaran ekonomi masyarakat. Dengan mengurangi kebiasaan merokok, diharapkan ekonomi masyarakat dapat lebih baik karena dana yang sebelumnya untuk rokok dapat dialokasikan ke hal lain.
Regulasi	Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 melarang merokok, menjual, atau mengiklankan produk rokok di wilayah desa. Hal ini memerlukan penegakan hukum yang jelas dan konsisten untuk mencapai tujuan program.

Sumber, hasil penelitian 2022

Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, yang dimulai sejak tahun 2008, memiliki dimensi yang beragam dalam upayanya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Dimensi kesehatan menjadi fokus utama program ini dengan tujuan mengurangi dampak negatif merokok terutama pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Secara sosial, program ini bertujuan untuk mengubah norma yang mengizinkan merokok di masyarakat desa, yang telah menjadi bagian dari budaya mereka. Dalam konteks ekonomi, program ini berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan mengurangi pengeluaran untuk rokok, yang sebelumnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Regulasi yang diterapkan melalui Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang penting, tetapi penegakan hukum yang konsisten masih diperlukan untuk mencapai efektivitas penuh dari program ini.

Tabel. 2 Temuan Penelitian Implementasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone

Dimensi	Temuan
Kebijakan dan Peraturan	Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 menetapkan larangan merokok, menjual, atau mengiklankan produk rokok. Pelanggar dikenai sanksi sosial seperti kerja sosial tanpa imbalan dan teguran langsung bagi pendatang. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih sehat dengan mengurangi kebiasaan merokok yang tidak sehat di kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan pemuda.
Kurangnya Inovasi Kebijakan	Kurangnya inovasi kebijakan mempengaruhi efektivitas implementasi program, sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Evaluasi dan perbaikan kebijakan yang minimal menyebabkan kesulitan dalam mencapai hasil yang diharapkan, menghambat upaya menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok secara konsisten.

Dimensi	Temuan
Pelaksanaan Sanksi	Masyarakat menganggap sanksi sosial yang ada saat ini tidak cukup efektif untuk membuat pelanggar jera. Akibatnya, pelanggaran terhadap kebijakan ini masih sering terjadi, terutama di kalangan pemuda yang masih sering terlihat merokok di kawasan desa.
Peran Kepala Desa	Setelah Kepala Desa Idris, kepala desa berikutnya tidak melakukan inovasi dalam program tersebut. Kepala Desa yang saat ini kembali menjabat, Muh. Idris, berencana untuk memperbaiki infrastruktur dan melakukan pembangunan baru seperti rumah sehat. Namun, selama masa jabatan kepala desa sebelumnya, tidak ada upaya signifikan untuk memperbarui atau meningkatkan program Kawasan Bebas Asap Rokok.
Fasilitas Penunjang Program	Fasilitas seperti tugu informasi dan papan pemberitahuan belum diperbarui. Ada rencana perbaikan infrastruktur oleh kepala desa saat ini, tetapi tindakan konkret belum dilakukan. Kepala desa saat ini berencana memperbaiki tugu dan membangun fasilitas baru yang mendukung program, namun pelaksanaannya masih perlu dilihat.
Dukungan dan Komitmen	Konsistensi dalam penerapan kebijakan dan penegakan sanksi perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan program. Dukungan yang kuat dan komitmen dari semua pihak akan membantu dalam memastikan program ini berjalan dengan sukses dan berkelanjutan.
Evaluasi dan Perbaikan	Perlu ada evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki program dan mengadopsi inovasi yang relevan untuk masa depan. Evaluasi ini penting untuk memastikan program terus berkembang dan mencapai tujuannya secara efektif.
Pengaruh Sosial dan Kultural	Pendekatan sosialisasi yang baik diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program ini. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih mendukung dan mengikuti kebijakan yang ada.
Tantangan Implementasi	Dengan pendekatan dan penjelasan yang baik, masyarakat mulai memberikan respons positif, tetapi pelanggaran masih terjadi. Tantangan ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dan pendekatan yang inklusif dalam pelaksanaan program.
Rekomendasi untuk Masa Depan	Pemerintah desa harus berkomitmen untuk melakukan sosialisasi intensif dan melibatkan semua pihak dalam setiap tahap pelaksanaan program. Dengan dukungan yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan, program ini dapat mencapai tujuannya menciptakan lingkungan desa yang bebas dari asap rokok.

Sumber, Hasil Penelitian, 2022

Analisis teoritis terhadap implementasi program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone mengacu pada beberapa konsep dalam teori kebijakan yang relevan. Pertama, dalam konteks kebijakan dan peraturan, program ini menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten terhadap larangan merokok dan kegiatan terkait di wilayah desa. Konformitas dengan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 menjadi landasan utama, tetapi kurangnya penegakan yang konsisten dapat mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat.

Kedua, kurangnya inovasi kebijakan merupakan masalah serius yang dihadapi program ini. Tanpa kebijakan baru yang mendukung atau memperbarui pendekatan yang ada, sulit untuk menyesuaikan strategi dengan perkembangan dan tantangan baru yang muncul seiring waktu. Evaluasi yang terbatas terhadap implementasi juga membatasi kemampuan program untuk beradaptasi dan meningkatkan efektivitasnya. Ini mencerminkan pentingnya adopsi teori perubahan kebijakan yang memperhitungkan kebutuhan untuk inovasi dan adaptasi berkelanjutan.

Ketiga, dalam konteks sosial dan kultural, program ini berusaha untuk mengubah perilaku masyarakat terkait merokok yang telah menjadi bagian dari budaya lokal. Pendekatan sosialisasi yang efektif dan inklusif diperlukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat secara positif. Strategi komunikasi yang lebih baik dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini, sehingga membantu dalam mencapai tujuan jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Keempat, tantangan implementasi yang dihadapi mencakup resistensi dari beberapa segmen masyarakat yang merasa bahwa hak mereka dibatasi oleh kebijakan ini. Ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat desa. Strategi partisipatif dan kolaboratif dapat membantu mengatasi hambatan ini dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program.

Secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas program Kawasan Bebas Asap Rokok, penting untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan inovasi kebijakan, memperbaiki strategi sosialisasi, dan mengatasi tantangan implementasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan demikian, program ini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang diinginkan secara berkelanjutan di Desa Bone-Bone.

KESIMPULAN

Simpulan

Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone merupakan inisiatif yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mengurangi dampak negatif merokok terutama pada anak-anak dan pemuda. Meskipun program ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009, implementasinya menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya penegakan hukum yang konsisten, kurangnya inovasi kebijakan, dan resistensi dari sebagian masyarakat terhadap pembatasan hak mereka terkait merokok. Evaluasi terbatas terhadap implementasi juga menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas program ini.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk fokus pada peningkatan penegakan hukum terhadap kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, dengan memperkuat efektivitas sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggar. Penting juga untuk mengusulkan inovasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kultural masyarakat desa, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan sosialisasi yang lebih intensif. Evaluasi program secara berkelanjutan perlu ditekankan

untuk menilai dampak dan keberhasilan program, memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan ke depan. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Desa Bone-Bone.

REFERENSI

- Dewanti, M., Priyo Purnomo, E., & Nur Kasiwi, A. (2021). UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGENDALIAN TEMBAKAU. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01). <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2243>
- Hasibuan, R. L., & Harahap, P. S. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7).
- Jatmika, S. E. D., Maulana, M., Kuntoro, & Martini, S. (2018). Pengendalian Tembakau. In *Eprints.Uad.Ac.Id* (Issue 9).
- Muslimin, N. Q. W. (2016). Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. In *core.ac.uk*.
- Najihah, N., Paridah, P., Aldianto, D., & Asmhyaty, A. (2023). Edukasi Bahaya Merokok sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK). *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.161>
- Nurdin, Z. (2016). Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. <https://Core.Ac.Uk/>.
- Nurhidayati, N., Syamsun, A., Lestari, R., & Arrohman, P. (2017). STUDI KEBIJAKAN LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM SEBAGAI KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK. *Unram Medical Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.29303/jku.v3i4.102>
- Oxa, M. G., Prasanti, N. hendrata, Kusumo, A. ratna, Izzah, I., Azizah, A. nur, Purnama, D. fanisya, Fadhilah, S. nur, Ningtyas, R. dwi, Amaliah, W. rizqi, Tantri, P. karina, Hikmah, H. izzatul, & Yuda, A. (2022). Identifikasi Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Merokok pada Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 9(1). <https://doi.org/10.20473/jfk.v9i1.24143>
- Pugesehan, D. J., & Latuheru, R. D. (2019). EFEKTIVITAS PENERAPAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DAN ATURAN ETIKA DAN PERILAKU MAHASISWA DI FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU. *MOLUCCAS HEALTH JOURNAL*, 1(3). <https://doi.org/10.54639/mhj.v1i3.256>
- Rosdianti, Y. (2021). Perlindungan Hak atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(8). <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.72>
- Sahara, B. H. (2020). Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Endrekang. *Jurnal Enersia Publika*, 4(2).